



PTUN Tolak Gugatan PDIP

Hormati Keputusan

DPP PDIP menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyatakan tak menerima gugatan mereka soal penetapan hasil Pilpres 2024. PTUN Jakarta mengatakan perkara itu bukan kewenangan mereka.

"Kita hormati putusan pengadilan atas gugatan kami," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy saat dihubungi, Kamis (24/10).

Ronny mengaku pihaknya

masih akan bermusyawarah soal peluang langkah hukum yang akan diambil selanjutnya. Oleh karena itu untuk saat ini, dia mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh soal itu.

"Soal langkah selanjutnya dari partai, kami akan bermusyawarah terlebih dulu. Saya belum bisa memberikan komentar apapun karena belum menerima dan membaca secara lengkap putusan tersebut. Terutama soal pertimbangan majelis terkait gugatan kami," kata Ronny. (cnni/js)



Jakarta, MIMBAR - Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan tidak menerima permohonan yang diajukan PDI Perjuangan (PDIP) terkait penetapan hasil Pilpres dan Pileg 2024.

Amar putusan perkara nomor:133/G/TF/2024/PTUN.JKT ini dibacakan secara elektronik (e-court) oleh majelis hakim PTUN Jakarta pada Kamis (24/10).

"Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima," demikian amar putusan tersebut. Selanjutnya, PDIP selaku

penggugat diminta membayar biaya perkara sebesar Rp342.000.

Tergugat dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pada Kamis, 30 Mei 2024, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan permohonan

■ Bersambung ke Hal 11

BURUH MINTA KENAIKAN UMP 2025 10 PERSEN :

Sejumlah elemen buruh kembali berunjuk rasa mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan menuntut upah yang lebih tinggi di Jakarta pada 24 Oktober 2024. Dalam aksinya, para buruh menuntut pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8 hingga 10 persen. Para buruh berkeberatan ketika kenaikan UMP didasari oleh pertumbuhan ekonomi atau inflasi. (Foto Liputan6.com)



DPD Siap Bantu Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Jakarta, MIMBAR - Ketua Komite III DPD Filep Wamafma mengapresiasi visi pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

■ Bersambung ke Hal 11



146 Imigran Rohingya Terdampar di Deliserdang

Deliserdang, MIMBAR - Imigran ilegal etnis Rohingya asal Myanmar berjumlah 146 orang ditemukan berlabuh di muara Pantai Dewi Indah, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (24/10).

Para imigran gelap ini menempuh perjalanan laut menggunakan perahu hingga akhirnya tiba di muara Pantai Dewi Indah. Para

imigran ini terdiri dari 64 orang pria dewasa, 62 orang wanita dewasa dan sebanyak 20 orang anak-anak.

Sekretaris Camat (Sekcam) Pantai Labu Azizur mengatakan kehadiran para imigran ini awalnya diketahui warga sekitar. Kemudian warga melaporkan kejadian itu ke Pos Angkatan Laut (AL) Pantailabu.

■ Bersambung ke Hal 11



Jadwal Salat

21 RABIUL AKHIR 1446 H

Subuh : 04:53 WIB	Maghrib : 18:12 WIB
Zuhur : 12:13 WIB	Isya : 19:22 WIB
Ashar : 15:31 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Kesiapan Perguruan Tinggi

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UIINSU)

PENDIDIKAN tinggi memainkan peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan tinggi harus mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan tuntutan zaman. Berikut adalah beberapa aspek pendidikan tinggi yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan seperti relevansi Kurikulum. Pendidikan tinggi harus menawarkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Kurikulum harus terus diperbarui agar selaras dengan perubahan global, seperti digitalisasi, otomatisasi, dan kebutuhan tenaga kerja yang semakin spesifik. Interdisipliner dan Fleksibel. Kurikulum yang bersifat interdisipliner memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan di berbagai bidang.

■ Bersambung ke Hal 11

KPK Periksa Petinggi Demokrat

Kasus Suap Hasbi Hasan Dibongkar

Jakarta, MIMBAR - KPK memeriksa Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rachland Nashidik sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan Rachland diperiksa bersama dua saksi lain yaitu pegawai Ombudsman Tumpal Simanjuntak dan wiraswasta Kuntomo Jenawi. "Pemeriksaan dilakukan di



Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).

Usai diperiksa, Rachland mengaku ditanya sekitar lima pertanyaan oleh penyidik KPK terkait kasus yang menjerat Hasbi

Hasan. Ia mengaku diklarifikasi terkait hubungannya dengan Menas Erwin Djohansyah selaku Dirut PT Wahana Adyawarna yang sudah menjadi tersangka.

■ Bersambung ke Hal 11

Makan Bergizi Gratis Dimulai 2 Januari 2025

Jakarta, MIMBAR - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dilaksanakan mulai 2 Januari 2025.

Hal ini disampaikan Dadan usai mengikuti sidang kabinet (sidkab) perdana pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Rabu (23/10).

■ Bersambung ke Hal 11



- Masih seperti yang dulu ...
- Hehehe.

Warga Bangladesh Tuntut Presidennya Mundur

Bangladesh, MIMBAR - Bangladesh kembali diguncang demonstrasi menuntut Presiden Mohammed Shahabuddin mundur, Rabu (23/10). Ratusan peserta demo menggeruduk kediaman Shahabuddin di ibu kota Bangladesh, Dhaka. Para pedemo juga berusaha merusak bakar pembatas rumah itu. Mereka meminta Shahabuddin mundur dan menuduh dia setia ke eks Perdana Menteri Sheikh

Hasina serta partainya Liga Awami. "Sejak mahasiswa-mahasiswi memimpin protes ke rezim fasis. Seharusnya tidak ada presiden dari rezim itu," kata pemimpin protes, Faruk Hossain. Faruk lalu berujar, "Dia harus diganti oleh presiden rakyat." Di tengah tuntutan tersebut, demo diwarnai bentrok antara peserta dengan pasukan keamanan. Imbas bentrok tersebut, setidaknya 25 polisi

dan lima warga sipil mengalami luka-luka. Kelima orang itu yakni tiga warga sipil dan dua jurnalis. Sementara itu, wakil Komisioner Polda Metro Dhaka, Telebur Rahman, mengatakan sejumlah petugas dalam kondisi kritis. "Sembilan orang masih dalam perawatan," kata dia. Rahman juga mengatakan sejumlah peserta demo menyerang petugas dan melempar batu

ke arah mereka. Saat ini, kata dia, situasi sudah mereda dan bisa di atasi. Bangladesh sempat bergejolak karena demonstrasi pada April lalu. Protes ini dipimpin mahasiswa-mahasiswi yang menuntut Hashina mundur. Hashina lalu mundur dan kabur ke luar negeri. Saat ini, PM dipegang Mohammed Yunus dari kalangan sipil. (cnni/js)

Makan Bergizi...

Dari Halaman 1

"Jadi (2 Januari 2025). Jadi pada prinsipnya program ini harus jalan dan semua harus membantu program ini bisa jalan," ujar Dadan. Untuk lebih detail mengenai program ini, ia menyebutkan akan disampaikan langsung oleh Prabowo sebelum dilaksanakannya secara resmi. "Nantilah yang kayak gitu ya pak presiden yang menyampaikan," kata dia.

Makan Bergizi Gratis memang salah satu program unggulan Prabowo-Gibran. Sasarannya adalah anak sekolah dan ibu hamil dengan memprioritaskan daerah 3 T pada tahun pertama pemerintahan. Program ini akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 82,9 juta penerima pada 2029. Untuk, tahun pertama, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025. (cnni/js)

146 Imigran...

Dari Halaman 1

"Para imigran ini tiba di pantai Dewi Indah sekitar pukul 04.00 WIB tadi. Saat ini para imigran Rohingya yang terdampar di muara Pantai Dewi Indah sudah dibawa ke Kantor Camat Pantai Labu," kata Azizur. Dia mengatakan petugas masih melakukan pendataan terhadap para imigran tersebut. Namun petugas masih kewalahan karena para imigran tidak memahami bahasa Indonesia. "Selanjutnya kita

arahkan di Aula Kantor Camat Pantai Labu agar bisa koordinasi dengan pihak terkait. Bagaimana koordinasinya nanti kita sampaikan kalau sudah ada kesepakatan pihak-pihak terkait," urainya. Kehadiran ratusan orang imigran ini menjadi tontonan warga sekitar. Saat berita ini ditulis, personel Polresta Deliserdang, Kodim 0204/DS dan Imigrasi sudah tiba di kantor Camat Pantai Labu untuk melakukan pendataan para imigran tersebut. (cnni/js)

Para demonstran di Bangladesh menuntut Presiden Mohammed Shahabuddin mengundurkan diri (AP Photo/ Mahmud Hossain Opu)



DPD Siap...

Dari Halaman 1

Prabowo menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen dalam dua tahun pertama masa jabatannya. Diketahui bahwa saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 adalah 9,79 persen. Di antara angka tersebut, terdapat 0,83 persen penduduk masih dalam keadaan miskin ekstrem. Kategori miskin ekstrem yang dimaksud adalah jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau setara Rp322.170/orang/bulan (berdasarkan data BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang maka pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan. "Saya selaku ketua komite III DPD RI tentu sangat mendukung rencana Presiden dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi 3 wilayah yang masuk miskin ekstrem tersebut ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan,

dan Papua. IPM di wilayah Timur dan Barat masih tidak merata. Akibatnya ketimpangan melebar, kemiskinan ekstrem masih terjadi. Saya berharap keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh semua terutama di wilayah Timur Indonesia," ucap Filep dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis, 24 Oktober 2024. Lebih lanjut, senator dan juga akademisi hukum ini menyoroti strategi pengentasan kemiskinan. Filep menyebut bahwa kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. "Mengingat kompleksnya persoalan kemiskinan ini, maka saya berharap adanya cara pandang yang sama antara pemerintah dan DPD RI dalam melihat kemiskinan," ungkapnya. "Kedua, harus ada sinergi antara fiskal dan moneter, sehingga ada transformasi ekonomi yang nyata dalam hal peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang urgen," jelasnya.

"Ketiga, perlu afirmasi khusus pengentasan kemiskinan untuk wilayah-wilayah berotonomi, dan wilayah-wilayah dengan kemiskinan ekstrem. Komite III DPD RI berharap dengan cara ini, target pemerintah dapat tercapai dalam mengentaskan kemiskinan," tambah Filep. Senator asal Papua Barat itu juga menyebut bahwa akar lain dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas pendidikan. Karena itu, institusi Pendidikan dari Tingkat dasar hingga perguruan tinggi wajib menjadi perhatian khusus. "Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menyebabkan produktivitas Masyarakat rendah. Ini berdampak luas terhadap daya saing masyarakat. Karena itu, sepanjang kualitas Pendidikan tidak diperbaiki, itu sama saja negara memelihara kemiskinan. Untuk itu, segenap stakeholder wajib ambil bagian dalam memperbaiki institusi Pendidikan," pungkasnya. (rm/js)



Kesiapan Perguruan...

Dari Halaman 1

sehingga lebih siap menghadapi kompleksitas dunia kerja. Program studi juga perlu fleksibel agar mahasiswa bisa menyesuaikan minat dan kebutuhan karier mereka. Kurikulum harus menekankan keterampilan penting seperti critical thinking, problem-solving, kemampuan berkomunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru dan literasi digital sangat penting. Kemudian pengembangan Keterampilan Praktis. Selain pengetahuan teoretis, pendidikan tinggi perlu menekankan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini dapat dicapai melalui: Menyediakan program magang atau kerja praktik untuk memberi pengalaman dunia nyata dan meningkatkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Perguruan tinggi harus bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan program studi yang berbasis pada kebutuhan lapangan kerja dan inovasi teknologi, misalnya melalui kelas industri atau proyek penelitian kolaboratif. Penguasaan teknologi terkini (AI, big data, IoT) sangat penting dalam bidang-bidang seperti sains, teknik, bisnis, dan kesehatan. Mahasiswa harus diberikan akses ke alat dan platform teknologi terbaru. Disamping itu Pendidikan Karakter dan Etika. Pendidikan tinggi harus menekankan pendidikan karakter untuk membentuk lulusan yang berintegritas dan bertanggung jawab sosial. Nilai-nilai etika, disiplin, dan kepemimpinan sangat penting dalam membangun generasi yang mampu membawa perubahan positif. Mahasiswa perlu didorong untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang tidak

hanya berorientasi pada profit, tetapi juga peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan. Pendidikan Moral dan Etika Profesi sabgat penting untuk memastikan bahwa lulusan mampu bekerja secara profesional dengan menjaga standar etika yang tinggi. Tidak kalah penting, inovasi dan Penelitian. Pendidikan tinggi harus menjadi pusat inovasi dan penelitian. Untuk menciptakan masyarakat yang berbasis pengetahuan dan inovasi, perguruan tinggi perlu mendorong mahasiswa dan dosen untuk aktif dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Fokus pada penelitian terapan yang memiliki dampak nyata pada masyarakat, industri, dan lingkungan. Hasil penelitian harus diarahkan untuk menciptakan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi bangsa, seperti energi terbarukan, kesehatan, atau ketahanan pangan. Perguruan tinggi bisa mendirikan inkubator untuk mendukung mahasiswa dan dosen dalam menciptakan start-up atau produk inovatif yang bisa dipasarkan. Untuk mencapai standar pendidikan tinggi yang bersaing secara global, universitas di Indonesia perlu memperkuat keterlibatan internasional. Mahasiswa dan dosen harus mampu bersaing dan bekerja dalam konteks global. Perlu Pertukaran Mahasiswa dan Dosen. Program pertukaran mahasiswa dan dosen ke luar negeri memberikan pengalaman internasional dan membuka wawasan global, penting untuk membangun kolaborasi lintas negara. Universitas harus menjalin kemitraan dengan universitas luar negeri dalam bidang penelitian bersama, dual degree, atau program pertukaran akademik. ***

Dari Halaman 1

pemohon intervensi atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Majelis hakim menyatakan kedudukan pemohon intervensi atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak tergugat II Intervensi dalam perkara nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT. Sejumlah bukti surat atau tulisan dan saksi-saksi telah dilakukan pemeriksaan. Dalam perkara ini, PDIP melalui ketua umum Megawati Soekarnoputri mendaftarkan permohonan untuk menggugat KPU. PDIP meminta majelis hakim PTUN Jakarta memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor

360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim juga diminta memerintahkan KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan KPU 360/2024 sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, PDIP meminta majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan batal

Keputusan KPU dimaksud. Selain itu, majelis hakim diminta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali Keputusan KPU 360/2024. "Memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024," bunyi petitum PDIP. Adapun Prabowo-Gibran telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10) lalu. Mereka juga telah membentuk dan melantik menteri di Kabinet Merah Putih. (cnni/js)



Kasus Suap...

Dari Halaman 1

Dia membantah menerima aliran dana dari Erwin terkait kasus ini. Dia mengklaim hubungannya dengan Erwin sebatas mantan kolega di sebuah perusahaan. "Enggak ada lah. Saya cuman deklarifikasi kenal sama siapa, sama Erwin segala macam begitu," kata Rachland di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Dalam kasus ini, Erwin diduga memberi-

kan Hasbi Hasan fasilitas menginap di Fraser Residence Menteng pada 5 April sampai 5 Juli 2021 dengan fasilitas sewa kamar nomor 501 tipe apartemen senilai Rp 120.100.000. Pemberian fasilitas itu diduga masih terkait pengurusan perkara yang sedang diproses di MA sebagaimana tertulis dalam dakwaan terkait penerimaan gratifikasi Hasbi Hasan sejak Januari 2021 hingga Februari 2022. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan hukuman Hasbi Hasan

yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Hasbi divonis dengan pidana enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidi enam bulan kurungan plus uang pengganti Rp3,8 miliar subsidi satu tahun penjara. Hasbi Hasan kemudian mengajukan kasasi atas vonis enam tahun penjara tersebut. Hal itu diketahui dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. (cnni/js)